

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAPORAN
KEUANGAN SESUAI PSAP NO.1 PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN MANADO**

Renith Aprionys Linggupa

Universitas Prisma

Pembimbing 1:

Leroy T. Ruhupatty, Ph.D

Universitas Prisma

Pembimbing 2:

Amelia A.A Lambajang, SE.,MSA

Universitas Prisma

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Manado telah memenuhi persyaratan penyajian laporan keuangan menurut PSAP No. 01, menyesuaikan struktur laporan keuangan pemerintah kota Manado dengan PSAP No. 01 dan melihat apakah isi laporan keuangan Pemerintah Kota Manado memenuhi persyaratan minimum isi laporan keuangan sebagaimana dalam PSAP No. 01. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serata karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan akuntansinya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No. 01, untuk proses pencatatannya telah sesuai juga, walaupun ada sedikit kekurangan dalam mencantumkan unsur-unsur pada laporan realisasi

Anggaran, namun laporan keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa digunakan oleh kelompok pengguna laporan keuangan guna mengambil keputusan.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan saat ini ditandai dengan peningkatan tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan "kewajiban untuk Bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya" (Marpaung & Arif, 2023). Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai organisasi sektor publik adalah melalui penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan tersebut akan disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Standar akuntansi pemerintahan tujuannya adalah "bahan

acuan bagi penyusun pusat dan daerah dalam melaksanakan pekerjaannya, penyusun laporan keuangan menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP PSAP NO.1, pemakai laporan keuangan Menjadi acuan dalam menafsirkan informasi yang disajikan . "Standar laporan keuangan yang disusun menurut SAP." "Siti Unun Fatayati , Abdul Juli Andi Gani (2020)"

Setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disampaikan sesuai dengan (SAP). Laporan keuangan dan SAP dinyatakan dalam (PSAP) NO.1, tentang laporan keuangan pemerintah. PSAP NO.1 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai laporan keuangan. Tujuan standar akuntansi pemerintahan penetapan dasar penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang undangan No 88 Tahun 2021.

Badan PKRI percaya bahwa pengelolaan fiskal pemerintah daerah sering kali mengarah pada “pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan hal ini merupakan permasalahan serius yang harus segera diatasi sebelum berupaya mengoptimalkan keuangan pemerintah daerah bagi program kemakmuran rakyat, perubahan paradigma pada pemerintahan saat ini adalah lahirnya pemerintahan yang demokratis, terorganisir, bersih, transparan, partisipatif, amanah dan akuntabel, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.” “Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma tata kelola yang baru merupakan hal yang mendasar dan memerlukan sistem yang memungkinkan adanya daya saing di tingkat regional dan nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus bergantung pada pemerintah pusat”. (Suteja, 2018) mengatakan “bahwa analisis laporan keuangan melibatkan penjabaran unsur-unsur laporan keuangan dan memeriksa hubungan antara unsur-unsur tersebut dalam laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi keuangan perusahaan sehingga informasi tersebut dapat

digunakan dalam pembuatan suatu keputusan bisnis maupun investasi.”

Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang “sistem keuangan pemerintah yang memberikan defenisi terhadap akuntansi pemerintahan daerah sebagai proses pencatatan pengelolaan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat umum keuangan meliputi pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip perekonomian yang paling menyeluruh dalam sistem pemerintahan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.”

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. “Sesuai amanat undang-undang yaitu pasal 5 ayat 2 UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Setelah melalui proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pemangku kepentingan, akhirnya ditetapkan melalui regulasi pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005.”

Fenomena terbaru terkait pertanggungjawaban APBD oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Peraturan ini mengharuskan entitas akuntansi untuk tidak hanya menyusun laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan dan catatan atas laporan keuangan, tetapi juga menyajikan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Laporan operasional memuat ringkasan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. “Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, di mana kejadian atau transaksi hanya dicatat saat kas diterima atau dibayarkan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meminta agar kejadian atau transaksi dicatat pada periode terjadinya.” Catatan transaksi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan operasional. Proses penyusunan laporan operasional ini dilakukan oleh semua SKPD, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

Setiap Kota di berikan kekuasaan dan dan kewenangan untuk menata dan

mengelola daerahnya masing-masing. Sebagaimana pada daerah Kota Manado ini dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangannya sesuai PSAP No.1, dimana Peraturan Daerah adalah sebagai salah satu tugas Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengandung makna dan hasrat untuk lebih memacu pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin meningkat pada saat ini.

Seperti yang terjadi saat ini, secara konsepsi akuntansi mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan di Kantor KSOP Manado belum dapat diyakini kewajarannya. Sebab ada beberapa laporan keuangan di Kantor KSOP Manado yang penyusunan dan penyajian laporan keuangannya terdapat kesalahan dalam pelaporan keuangan Kantor KSOP Manado, sehingga timbulnya tuntutan ganti rugi oleh Negara kepada pihak pengguna anggaran, LKPD yang disajikan oleh pemerintah Kantor KSOP Manado, tidak menggambarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang wajar sehingga tidak diyakini kebenarannya.

II. TINJAUAN TEORI

2.1. Akuntansi

Akuntansi sebagai suatu sistem yang melibatkan input data/informasi dan menghasilkan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal entitas. Akuntansi sebagai sistem terdiri dari input, yaitu transaksi, proses, yaitu rangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan. Dari pengertian tersebut, terdapat empat hal penting yang menjadi komponen akuntansi (Shovia et al., 2020).

2.2. Teori Pendukung Dasar Akuntansi

Teori Entitas: Teori ini menyatakan bahwa entitas bisnis atau organisasi harus dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, sehingga transaksi dan keuangan entitas tersebut harus dipisahkan dari transaksi dan keuangan pemiliknya.

2.3. Tujuan Lembaga Publik Akuntansi

1. “*Compliance and stewardship* (kepatuhan dan pengelolaan).”
2. “Pelaporan Akuntabilitas dan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*).”
3. “*Planning and authorization information* (perencanaan dan otorisasi informasi).”
4. “*Liability* (kelangsungan organisasi).”
5. “*Public Relation* (hubungan masyarakat).”
6. “*Source of Fact and Figures* (sumber fakta dan angka).”

2.4. Akuntansi Pemerintahan

Tujuan dari akuntansi keuangan pemerintah di atas adalah “Menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.” Dalam penyelenggaraan akuntansi, Menteri Keuangan akan menggunakan Sistem Akuntansi Pusat (SAP) sebagai pusatnya (Ditjen Kementerian Keuangan) dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAI)

yang diterapkan di masing-masing kementerian negara.”

2.5. Akuntansi Pemerintah Daerah

“Akuntansi Keuangan daerah adalah “akuntansi yang dipakai oleh Pemerintahan Daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah”. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah (Hasibuan, 2018).” Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.

2.6. Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Unit pemerintah daerah, baik yang melaporkan maupun yang mengelola akuntansi, dianggap sebagai entitas yang mandiri dan memiliki tanggung

jawab untuk menyajikan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekacauan antara unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikator pemenuhan asumsi ini adalah kemampuan entitas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran dengan tanggung jawab penuh. “Selain itu, entitas bertanggung jawab atas manajemen aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya. Ini termasuk manajemen aset dan sumber daya yang rusak atau hilang, utang yang dihasilkan dari keputusan entitas, dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.” Asumsi Kestinambungan Entitas.

2.7. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Erlina (2013) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah standar normatif yang harus terwujud dalam informasi akuntansi agar memenuhi tujuannya.

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan

4. Dapat dipahami

2.8. Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian menjadi dasar dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Laporan keuangan pemerintah daerah, gabungan

dari laporan keuangan SKPD dalam pemerintah daerah, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah digunakan untuk membandingkan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan menilai seberapa efektif dan efisien organisasi pemerintah daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

DESAIN PENELITIAN

Dalam desain penelitian ini saya menggunakan metode *Research Onion* (Saunders & Thornhill, 2007) karena penelitian ini bermula dari keyakinan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas terbaik dengan menggunakan standar akuntansi. asumsi tersebut bersifat subyektif dan dengan asumsi tersebut peneliti mengkaji dengan pendekatan *Humaniora* yang mana peneliti harus mendekati diri pada subjek penelitian. sistem nilai dan etika yang diyakini peneliti,

oleh karena itu karena asumsi tersebut peneliti berpegang teguh pada filsafat *Interpretivism* sehingga dalam filsafat *Interpretivism* peneliti akan menggunakan metode induktif untuk mendeteksi peristiwa. Studi kasus dan strategi penelitian kualitatif *cross-sectional*. Oleh karena itu, teknik pengumpulan datanya akan menggunakan teknik wawancara dan penelitian dokumen.

POPULASI

Supangat (2017) menyatakan bahwa populasi merupakan sekumpulan objek

yang nantinya akan menjadi bahan penelitian yang memiliki ciri berupa karakteristik yang sama. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor KSOP Kota Manado.

SAMPEL

Supangat (2017) menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi. Berikut adalah kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seluruh pegawai yang ada dalam divisi keuangan yang biasa disebut juga metode sampling.

METODE PENGUMPULAN DATA

Observasi adalah suatu kegiatan dimana pengamatan terhadap suatu obyek dilakukan untuk memperoleh melalui pengamatan, informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Informasi yang akurat diharapkan dapat diperoleh dari pengamatan. Menurut Nasution

(Sugiyono, 2016). "Pengamatan adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Di mana ada proses, ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang diperoleh melalui observasi."

Dokumentasi adalah aktivitas profesional yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pencarian, dan berbagi dokumen. Menurut Encyclopedia Britannica, dokumentasi adalah proses meninjau dan menyusun bibliografi menggunakan alat-alat seperti indeks, ringkasan, dan bibliografi konten, selain metode "klasik" tradisional untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan.

TEKNIK ANALISA DATA

1. Melakukan wawancara (rekaman)
2. Wawancara diubah menjadi teks/transkrip
3. Transkrip wawancara dikirim
4. Menganalisa transkrip wawancara

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kantor KSOP Manado Telah Memenuhi Persyaratan Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAP

Dalam praktiknya, penyajian laporan keuangan pemerintah tidaklah mudah. Tim keuangan Kantor KSOP Manado harus

memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dengan akurat dan terperinci sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PSAP. Hal ini mencakup pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran, termasuk transaksi yang kompleks sekalipun, serta penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan mudah

dipahami oleh pemangku kepentingan. Jurnal Penyesuaian (JP), Jurnal Penutup LRA (CL), dan Jurnal Penutup (CO). Setiap akun yang didebet dan dikredit hanya perlu diisi dengan nomor akun, dan nama akun akan terisi otomatis. Nama akun yang sudah terisi akan menghasilkan buku besar (general ledger) untuk setiap akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, serta laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh kantor KSOP Manado mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual

2. **Struktur Laporan Keuangan Pemerintah Kantor KSOP Manado Sesuai Dengan Struktur Laporan Keuangan Sebagaimana Dalam PSAP. 01**

Struktur laporan keuangan ini berisi tentang bagaimana laporan keuangan disusun, unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalamnya, dan format umum yang digunakan. Ini penting karena struktur laporan

keuangan yang jelas dan konsisten memungkinkan para pemangku kepentingan untuk dengan mudah memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, hal ini membantu dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Struktur laporan keuangan pada KSOP Manado yang sesuai dengan PSAP 01 meliputi beberapa elemen utama, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan arus kas, dan laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu organisasi selama suatu periode waktu, sehingga para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja keuangan dan stabilitas keuangan KSOP Manado. Selain itu, laporan laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh KSOP Manado selama periode tertentu. Laporan ini membantu para pemangku kepentingan dalam memahami kinerja operasional dan profitabilitas entitas. Selanjutnya, laporan arus kas menyajikan

informasi tentang arus masuk dan keluar kas dari berbagai aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Ini membantu dalam memantau likuiditas dan kemampuan KSOP Manado dalam mengelola arus kasnya.

3. **Isi Laporan Keuangan Pemerintah Kantor KSOP Manado Sudah Memenuhi Persyaratan Minimum Isi Laporan Keuangan Sebagaimana Dalam PSAP 01**

Isi laporan keuangan mencakup informasi keuangan yang signifikan dan relevan mengenai aktivitas keuangan dan keuangan pemerintah kantor tersebut. Ini mencakup catatan tentang pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, serta informasi lain yang relevan dengan posisi keuangan dan kinerja keuangan organisasi. Dengan demikian, melalui isi laporan keuangan ini, Kantor KSOP Manado memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan

keuangan mereka kepada pemangku kepentingan, seperti pemangku kepentingan internal, eksternal, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, memastikan keakuratan, kejelasan, dan keterbacaan isi laporan keuangan menjadi penting guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, dalam menjaga kualitas laporan keuangan, KSOP Manado juga perlu memperhatikan aspek kecukupan pengungkapan informasi. Pengungkapan informasi yang memadai akan memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk memahami dengan baik kondisi keuangan dan kinerja operasional entitas. Hal ini termasuk menyajikan informasi yang relevan, material, dan signifikan, serta menjelaskan dengan jelas kebijakan akuntansi yang diterapkan dan estimasi yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Y. (2018). Pengaruh penerapan PSAP nomor 01 terhadap kualitas laporan keuangan. *UNG repository*.

Afiyah, S., Arsy, A., & Engkus, E. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada pusat kesehatan masyarakat

- Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal inovasi penelitian*, 1113-1120.
- Agung, T., & Gayatri. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem. *E-jurnal akuntansi*.
- Ananda, A. (2022). Analisis penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan (PSAP) No. 01 pada pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. *Sistem informasi POLIJE repository aset (Sipora)*.
- Aulia, N., Marpaung, A., Andryani, S., Rachma, Y., Rasyidi, A., & Dalimunthe, S. (2023). Penerapan teknologi hydro perfection water filter sebagai alat mitigasi penyakit insang hitam pada tambak udang dahari selebar. *Jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 135-143.
- Fatayati, S. (2020). Analisis pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai pada tenaga kependidikan tetap non PNS di lingkungan kantor pusat Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 387-894.
- Fitriani. (2018). Penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten banggai. *jurnal ilmiah manajemen Ekonomi Manajemen Orientasi Riset (EMOR)*.
- Hasibuan, S. (2018). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi SKPD Kabupaten Padang). *repository.usu.ac.id*.
- Hasibuan, W. (2018). Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 07 tentang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kantor Gubernur Sumatera Utara. *Repository.uma.ac.id*.
- Jauhari, H., Dewata, E., & Hazisma, S. (2021). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan (JAK)*.

- Kapantow, E., Karamoy, h., & Kapojos, P. (2023). Penerapan pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Ejournal.unsrat*, 494-505.
- Kusuma, A., Mus, R., & Lannai, D. (2020). Penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan nomor 71 tahun 2010 pada Inspektorat Kabupaten Enrekang. *Journal of Accounting & Finance (JAF)*, 168-193.
- Majampoh, W., & Datu, C. (2021). Evaluasi penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang penyajian laporan realisasi anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Noho, M., & Ali, Y. (2021). Penerapan PSAP No. 01 dalam pertanggungjawaban keuangan di Desa Pentadio Timur. *Journal Syariah and Accounting Public (JSAP)*.
- Rahmadani, F. (2019). Analisis Penerapan Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang laporan keuangan pemerintahan pada Pemerintah Kota Subulussalam. *Repository UIN Sumatera Utara*.
- Rahmawati, P. (2020). Peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dalam proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Repository Universitas Airlangga*.
- Riswana, M. (2023). Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan No. 01 tentang penyajian laporan keuangan pada kantor camat Lembeyan Kabupaten Magetan. *Repository Muhammadiyah University Of Ponorogo*.
- Rizky, M. (2022). Tinjauan penerapan standar akuntansi pemerintah pada penyajian laporan keuangan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020. *repository digital politeknik keuangan negara STAN*.
- Selviyanti, P. (2020). Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan

- (PSAP) pernyataan akuntansi pemerintah nomor 01 tahun 2010 pada pengelolaan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang.
Repository.binadarma.ac.id.
- Shofia, T., Mutmainah, S., & Nikmatuniayah. (2020). Analisis penerapan PSAP no. 01 tentang penyajian laporan keuangan pada UPTD puskesmas Gunung Pati Semarang. *jurnal aktual akuntansi keuangan bisnis terapan (AKUNBISNIS)*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanti, A., Sondakh, J., & Kapojos, P. (2022). Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)*.
- Suteja, I. (2018). Analisis kinerja keuangan dengan metode ALTMAN Z-Score. *Jurnal Moneter*, 12-17.
- Wulandari, R. (2021). Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah no. 01 tentang penyajian laporan keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah. *Juhanperak*